GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : **Suara Pembaruan**	**Tgl/Bln/Thn**	:	**20 agustus 2007**
Subyek : **Perubahan iklim**	**Hari**	:	**Senin**
	Halaman	:	**06**

Perubahan Iklim Harus Masuk Perencanaan Kota

[STOCKHOLM] Para perencana kota di dunia diminta memasukkan dampak perubahan iklim ke dalam rencana penataan ruang. Dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, banjir, dan kekeringan, harus menjadi elemen dasar dalam membangun kota. Demikian kesimpulan yang disampaikan para ahli tata air saat konferensi internasional di Stockholm, Swedia, pekan lalu.

Stockholm International Water Institute (SIWI) memaparkan, saat ini hampir 80 persen populasi penduduk dunia bermukim dan beraktifitas kurang dari 50 kilometer dari bibir pantai. Oleh karena itu, kewaspadaan terhadap dampak perubahan iklim, terutama kenaikan permukaan air laut harus menda- pat perhatian. SIWI mengingatkan, melelehnya es di kutub memungkinkan kota-kota di pantai terancam jika tidak dilakukan adaptasi dan mitigasi sejak sekarang.

Hal serupa disampaikan Johan Kuylenstierna, Derektur World Water Week Conference kepada *AFP*. "Kami sungguh-sungguh terus mencoba meyakinkan agar perencanaan tata ruang setiap negara memasukkan dimensi perubahan iklim. Manajemen air merupakan salah satu faktor penting untuk bisa beradaptasi dengan perubahan iklim," ujar Kuylenstierna.

Dana Negara Maju

Sementara itu, Pemerintah Indonesia yakin bisa mendapat sokongan dana hingga US$ 3,75 miliar (Rp 33,75 triliun) per tahun dari negara-negara maju, lewat program yang dikenal dengan pengurangan deforestasi negara berkembang atau REDD.

Menteri Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, di Jakarta, seperti diberitakan *Antara* pekan lalu mengatakan, REDD adalah proposal negara-negara selatan atau negara berkembang yang masih memiliki hutan tropis sebagai salah satu skema penanganan perubahan iklim pascatahun 2012, yaitu ketika periode berlakunya perjanjian Protokol Kyoto berakhir.

"Kita ingin mendapat dana adaptasi untuk pemeliharaan hutan kita, sehingga dengan menjaga hutan tetap menjadi hutan maka Indonesia diberi bantuan dana oleh negara-negara maju," ujarnya.

Menurutnya, jika tiap hektare (ha) hutan berkelas prima dihargai US$ 10 per tahun, maka Indonesia diperkirakan bisa mendapat sekitar US$ 3,75 miliar karena saat ini pemerintah menyediakan hutan seluas 37,5 juta ha untuk proyek REDD.

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

Dia memastikan, negara-negara maju saat ini sudah memahami betul perlunya dana adaptasi bagi negara-negara selatan yang notabene sangat rentan terhadap dampak buruk perubahan iklim, seperti banjir dan kenaikan permukaan laut.

Sementara itu, untuk menyukseskan sidang antar-pihak Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (UNFCCC) yang akan digelar di Bali pada Desember 2007, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 114 miliar yang semuanya diambil dari APBN. [E-7]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP